

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA
PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR
(STUDI KASUS PERKARA NO. 62/Pid.B/2025/PN DPS)**

Oleh

Amanda Mellyuana, NIM 2214101066

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi dan menganalisis proses ditegaskannya hukum pada pelaku penyedia jasa pornografi di Kota Denpasar, serta (2) Menelaah berbagai kendala serta kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara tersebut menangani perkara tersebut, khususnya dalam kasus Flame Spa Bali dengan Nomor Perkara 62/Pid.B/2025/PN Dps. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan hukum empiris dengan karakter deskriptif. Diperolehnya data berasal dari berbagai sumber hukum yang di dalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang saling melengkapi satu sama lain. Pengumpulan data dilakukannya melalui penelusuran dokumen, observasi lapangan, serta wawancara. Ditentukannya objek penelitian dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu, dengan diambil secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling. Setelah terkumpulnya data, analisis yang diaplikasikan yaitu analisis kuantitatif. Temuan pada perkara ini memberi pemahaman bahwasanya (1) penegakan hukum pada penyedia jasa pornografi di Kota Denpasar dalam perkara No. 62/Pid.B/2025/PN Dps sudah berjalan dengan baik. Di dalam proses penegakan hukumnya sudah terdapat proses penyelidikan dan penyidikan yang diselenggarakan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh kejaksaan, hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan (2) terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terkait penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar. Tantangan dan hambatan ini muncul dari faktor aparat penegak hukum yang kesulitan dalam membuktikan unsur “jasa pornografi”, faktor sarana dan prasarana karena kurangnya tenaga aparat penegak hukum pada Polda Bali, masyarakat yang kurang berpartisipasi hingga dengan faktor kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyedia Jasa Pornografi, Kota Denpasar.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF PORNOGRAPHY
SERVICES IN THE JURISDICTION OF DENPASAR CITY (CASE STUDY
OF CASE NO. 62/Pid.B/2025/PN DPS)**

By

Amanda Mellyuana, NIM 2214101066

Legal Studies Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to (1) Identify and analyze the process of enforcing the law on pornography service providers in Denpasar City, and (2) Examine the various obstacles and difficulties faced by law enforcement officers in the proces of handling the case, especially the Flame Spa Bali case with Case Number 62/Pid.B/2025/PN Dps. This study applies an empirical legal approach with a descriptive character. The data obtained comes from various legal sources that include primary, secondary, and tertiary legal materials, which complement each other. Data were gathered by reviewing documents, conducting field observations, and carrying out interviews. Determinations of the research object is carried out based on certain criteria, taken intentionally using a purposive sampling technique. After the data is collected, the analysis applied is quantitative analysis. The results of the study provide an understanding that (1) law enforcement against pornography service providers in Denpasar City in case No. 62/Pid.B/2025/PN Dps has been running well. In the law enforcement process, there is an investigation and inquiry process carried out by the police, followed by a summons process by the prosecutor's office, until the court issues a ruling based on the relevant legal provisions; and (2) there are obstacles and challenges faced by law enforcement officers in the law enforcement process related to pornographic service providers in the jurisdiction of Denpasar City. These challenges and obstacles arise from factors of law enforcement officers who have difficulty in proving the elements of "pornographic services", factors of facilities and infrastructure due to the lack of law enforcement officers in the Bali Regional Police, the lack of community participation and factors of the cultural community itself.

Keywords: Law Enforcement, Pornography Service Providers, Denpasar City